



**PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TESIS

EKO SETIAWAN

1810622069

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eko Setiawan

NIM : 1810622069

Tanggal : 12 Januari 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2021

Yang Menyatakan,



Eko Setiawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Setiawan

NIM : 1810622069

Program Studi : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA” Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2021

Yang Menyatakan



Eko Setiawan

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Eko Setiawan

NRP : 1810622069

Program Studi : Hukum

Judul Tesis :

***“PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN
USAHA MILIK NEGARA”***

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Atik Winanti, SH., MH.
Ketua Penguji



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.
Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Beniharmon Harefa, SH, LLM
Kapropi



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Ditandatangani di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2021



PERTIMBANGAN HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DALAM DIVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Eko Setiawan,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
e-mail: ekosetia8724@gmail.com

Abstrak

Banyak pihak meyakini bahwa melalui upaya pencegahan oleh penegak hukum, korupsi dapat dihilangkan dari Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai fungsi pertimbangan hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Selama ini pelaksanaan fungsi tersebut lebih dipahami sebagai fungsi Kejaksaan dibidang keperdataan dan ketatausahaan negara saja meskipun pasal 34 tidak mengatur secara limitatif. Oleh karena itu, terdapat potensi pertimbangan hukum dapat menjadi instrumen untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu pihak yang membutuhkan pertimbangan hukum adalah BUMN dalam melakukan divestasi. Namun jika pertimbangan hukum hanya dimaknai sebatas ruang lingkup perdata dan tata usaha negara saja, maka upaya pencegahan korupsi tentunya akan sulit tercapai. Oleh karena itu, Penulis mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang memungkinkan pertimbangan hukum menjadi sarana pencegahan korupsi serta bagaimana optimalisasinya terhadap pencegahan korupsi dalam proses divestasi BUMN. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Kejaksaan memerlukan adanya faktor analisis hukum yang luas dari jaksa yang profesional agar dapat menjadi sarana pencegahan tindak pidana korupsi dan Upaya optimalisasi pertimbangan hukum dapat dilakukan dengan perluasan ruang lingkup dalam regulasi terkait pemberian pertimbangan hukum selain perdata dan tata usaha negara ditambah upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: BUMN, Divestasi, Kejaksaan, Pencegahan, Pertimbangan hukum.

Legal Considerations of the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a means of preventing corruption in the divestment process of State-Owned Enterprises

Eko Setiawan,
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
e-mail: ekosetia8724@gmail.com

Abstract

Many parties believe that through preventive efforts by law enforcement officials, corruption can be eradicated from Indonesia and the prosecutor's office can carry it out with the function of legal considerations. Currently this function is carried out in a limited manner, although regulations do not limit it. State-owned enterprises desperately need the authority of the prosecutor's office. They need a legal opinion that can protect them from potential violations of the law. The researcher used the normative juridical research method and concluded that the legal considerations carried out by the prosecutor required the existence of a broad legal analysis factor from professional personal in order to be a means of preventing corruption. Efforts to optimize legal considerations can be made by expanding the scope of regulations related to the provision of legal considerations other than civil and state administration and efforts to prevent criminal acts of corruption.

Keywords: BUMN, Divestment, Prosecutor's Office, Prevention, Legal Considerations

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan dan inspirasi umat muslim Nabi besar Muhammad saw.

Salah satu bentuk rasa syukur yang tak terhingga dalam perjalanan hidup Penulis adalah ketika Penulis dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata II (S2). Saat ini Penulis telah sampai pada tahap akhir dalam proses pembelajaran pada tingkat S2 tersebut yang ditandai dengan telah diselesaikannya penyusunan tesis. Didorong oleh kebutuhan akan aktualisasi diri dalam bidang hukum sesuai dengan latar belakang pekerjaan Penulis sebagai seorang praktisi hukum, Penulis bermaksud untuk mengangkat judul tesis yang memiliki relevansi dengan latar belakang pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, tesis yang diberi judul “**Pertimbangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi Dalam Divestasi Badan Usaha Milik Negara**” bagi Penulis bagaikan sebuah pencapaian hidup.

Sangatlah naif bila Penulis merasa tesis yang telah disusun tersebut dihasilkan oleh buah pikiran Penulis sendiri. Oleh karena itu, tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yenita Nurmalasari, istri yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat, Arslan Cavero Rasynusetia anak tercinta atas semangat dan keceriaan, Orang tua, Adik-adik dan keluarga besar. Selain itu tidak lupa kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada Penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor UPN Jakarta
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN Jakarta
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Jakarta
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Pembimbing sekaligus penguji.

5. Ibu Dr. Atik Winanti, SH., MH. Dan Bpk Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH. selaku Tim Penguji Tesis kami.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program magister Hukum UPN Jakarta, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum kelas kampus UPN angkatan 2018 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, Januari 2021

Penulis



Eko Setiawan
NPM 1810622069

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	5
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	6
I.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
II.1. Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia	13
II.2. Divestasi BUMN	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
IV.1. Faktor-faktor yang dapat mendukung Pertimbangan Hukum Kejaksaan sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi.....	27
IV.2. Optimalisasi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan dan kemanfaatannya terhadap proses divestasi BUMN.....	34
BAB V KESIMPULAN	41
V.1. Kesimpulan.....	41
V.2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
RIWAYAT HIDUP	